

Bahas PP IKN, Mendagri Temui Gubernur, Wali Kota dan Bupati di Kaltim

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggelar pertemuan dengan Gubernur Kaltim, Bupati dan Wali Kota se Kaltim untuk meminta masukan dan pendapat terkait rencana pembentukan Provinsi IKN Nusantara yang nantinya akan di Pimpin Kepala Kawasan Otorita setingkat Menteri dengan kewenangan yang luas.

Pertemuan ini dilakukan dengan Gubernur Kaltim Isran Noor, Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK, Plt Bupati PPU Hamdam, Wali Kota Balikpapan Rahmad Masud, Bupati Kutai Kerta Negara Edi Damansyah, Bupati Paser dr Fahmi Fadli, dan Wali Kota Samarinda Andi Harun di Aula Kantor Wali Kota Balikpapan.

“Usai mengunjungi IKN, Saya bertahan di Balikpapan karena ada satu tugas yang harus saya selesaikan yakni berkomunikasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dan sekaligus DPRD di Kaltim,” ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, usai memimpin pertemuan, Kamis (17/2/2022).

Tito mengatakan, pertemuan ini dalam rangka mempersiapkan Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari UU IKN yang baru saja disahkan DPR RI Januari 2022 lalu.

“PP ini salah satunya mengatur kewenangan IKN ini karena statusnya yang khusus, yang berbentuk provinsi dengan ke khususan di pimpin seorang Kepala Kawasan Otorita setingkat Menteri yang memiliki kewenangan yang luas,” ujarnya.

Tugas Kepala Kawasan Otorita IKN, katanya, adalah mempercepat pembangunan infrastruktur IKN, mengoperasionalkan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

“Kepala Kawasan Otorita ini ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Tito menambahkan, dalam pertemuan tersebut ia menyampaikan apa saja yang akan dilakukan pemerintah ke depan dalam pembangunan IKN, termasuk menyampaikan isi PP sebagai turunan dari UU IKN tersebut.

“Dan kita juga meminta beberapa masukan, dan memang ada beberapa masukan. Namun kami liat terutama sekali adalah dukungan yang kuat dari pimpinan daerah baik Gubernur, Ketua DPRD dan Bupati Wali Kota se Kaltim, untuk percepatan pembangunan IKN ini,” ungkapnya.

Kota Balikpapan, katanya, selama proses persiapan, pembangunan dan transisi menuju IKN sampai operasionalisasi, maka Balikpapan akan sebagai pintu gerbangnya dan di dukung dengan Kota Samarinda.

Sebagai pintu gerbang, katanya, maka sudah barang tentu banyak peluang yang perlu ditangkap termasuk investasi, sehingga daerah-daerah sekitar IKN membuat grand design, misalnya di PPU mau bangun apa, karena akan banyak investor kesana. Meskipun APBN akan mensupport, tapi buat market yang bisa bangun.

“Begitu juga konservasi teluk Balikpapan juga akan diperhatikan, karena pak Presiden ingin IKN jadi model kota lain ramah lingkungan, 20 persen gedung dan 80 persen wilayahnya daerah hijau,” paparnya.

Selain itu, rata-rata daerah sekitar ingin agar saat bangun IKN, daerah sekitar di bantu juga supaya pembangunan tidak jomplang.

“Tapi saya sampaikan dan suarakan tolong tarik investor masuk ke dalam, kami upayakan PP segera selesai sambil komunikasi dengan pemerintah daerah juga akan sering dilakukan,” tutupnya.